

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2022



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU

Jalan Sutan Syahrir No. 261 - Sanggau, Kalbar

78513

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, kami telah rampung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satker Imigrasi Kelas II TPI Sanggau Tahun Anggaran 2022. Dengan situasi yang sudah lebih membaik, banyak kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan, sehingga berdampak lebih optimalnya capaian output kegiatan, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan teknis. Dalam menyusun LKJIP ini, kami berpegang pada prinsip-prinsip umum yaitu jujur, objektif, akurat dan transparan, serta prinsip-prinsip khusus yaitu lingkup pertanggung jawaban, prioritas dan manfaat.



Pada Bab I Pendahuluan, kami paparkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang kami emban sebagai insan Imigrasi pada umumnya, serta struktur organisasi yang ada di Satker Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau dengan fungsi masing-masing bidang seksi. Selanjutnya kami menjabarkan secara garis besar capaian kinerja tahun anggaran 2021 sebagai acuan dalam menetapkan Janji Kinerja Tahun Anggaran 2022.

Bab II Perencanaan Kinerja, terdiri dari Perencanaan dan Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2022. Pada bagian Perencanaan Kinerja, kami paparkan sasaran strategis, indikator output (kegiatan), dan target 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, memaparkan sasaran strategi, indikator output (kegiatan), target 2022, Realisasi Kinerja baik anggaran maupun kegiatan berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2022 yang disajikan dalam bentuk persentase (%).

Dan di dalam Bab IV Penutup, kami sampaikan kesimpulan dan saran. Di sini kami paparkan kinerja yang telah kami capai, kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta rencana yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Demikian LKJIP ini kami susun. dengan harapan apa yang telah kami sajikan dapat menjadi laporan yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, terintegrasi dan akuntabel.



Sanggau, 10 Januari 2023

Kepala Kantor,

Alberthus Santani Fenat

NIP. 197202181992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. LATAR BELAKANG.....	3
B. PROFIL	4
C. TUGAS.....	5
D. STRUKTUR.....	7
E. MAKSUD	10
F. DASAR.....	11
G. PENGERTIAN.....	11
H. SISTEMATIKA	12
I. PERMASALAHAN.....	12
J. PERJANJIAN KINERJA 2022.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. RENCANA.....	17
B. PERJANJIAN KINERJA 2022.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. CAPAIAN KINERJA 2022	22
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 2022	24
BAB IV PENUTUP	35
A. KESIMPULAN	35
B. SARAN.....	35
LAMPIRAN :	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai Unsur Instansi Pemerintah, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peraturan diatas Unit Pelaksana Teknis merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah dan secara teknis bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Teknisnya. Secara organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Kantor Wilayah. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau sebagai Unit Pelaksana Teknis memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah dokumen yang berisi gambar perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau Tahun 2022 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada Visi, Misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau

dituntut selalu melakukan peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022.

B. PROFIL

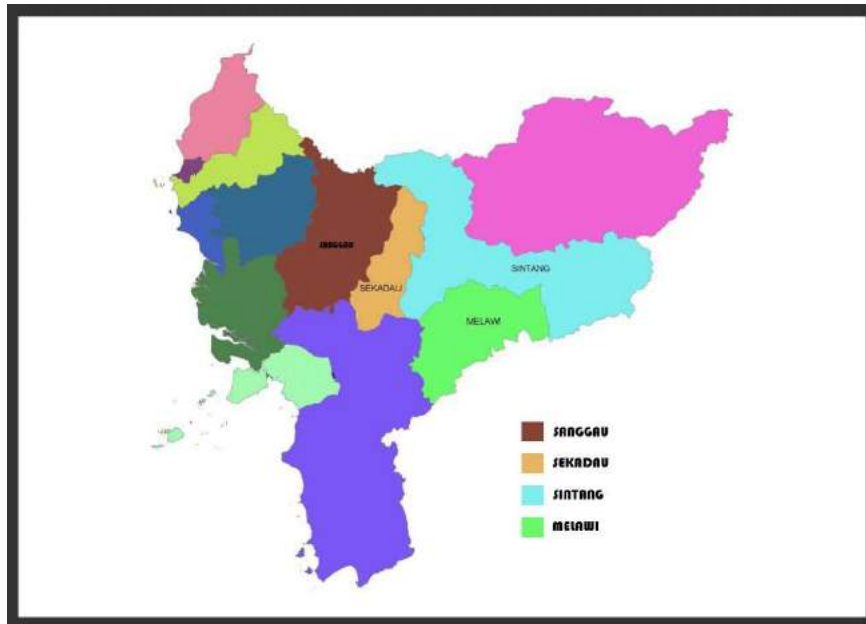
Secara geografis letak wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau meliputi 4 (empat) kabupaten dengan luas keseluruhan berjumlah 49.234 Km². Ke-empat kabupaten tersebut adalah : Kabupaten Sanggau (tidak termasuk Kec. Sekayam dan Kec. Entikong), Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. Luas Wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Melawi 31.159,70 km². Jumlah penduduknya 701.405 jiwa (tahun 2021) dimana sebagian besar etnisnya adalah Dayak dan Melayu. Masyarakatnya berprofesi sebagai Pegawai Negeri, Swasta, Petani dan Pedagang. Sumber alam berupa hasil hutan, kayu, kelapa sawit, bauksit dan minyak. Sedangkan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi memiliki luas 32.279 Km², dengan jumlah penduduk 654.916 jiwa berdasarkan data yang diambil dari <https://kalbar.bps.go.id> dan sebagian besar etnisnya adalah Dayak dan Melayu. Masyarakatnya berprofesi sebagai Pegawai Negeri, Swasta, Petani dan Pedagang. Sedangkan sumber alamnya menghasilkan kayu, kelapa sawit, emas, batubara, minyak dan uranium.

Sebelumnya Wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II Sanggau mencakup Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang (dimekarkan menjadi Kabupaten Melawi) dan Kabupaten Sanggau (dimekarkan menjadi Kabupaten Sekadau). Saat itu Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau membawahi Pos Lintas Batas Entikong, Bantan, Merakai Panjang dan Nanga Badau. Namun pada bulan Februari 1992 Pos Lintas Batas Entikong yang sebelumnya berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Sanggau diubah statusnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas III Entikong dan sekarang telah berubah menjadi kantor imigrasi kelas II.

Selanjutnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau dimekarkan lagi dengan dibukanya Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-03.OT.01.01 Tahun 2013, dengan demikian maka wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau khususnya yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia meliputi 4 (tiga) daerah pemukiman penduduk, yaitu : Jasa, Nanga Bayan, Semareh dan Sungai Kelik. Dari ke-4 tempat pemukiman penduduk tersebut hingga saat ini baru Sungai Kelik yang pada Tahun Anggaran 2022 akan mulai memasuki tahap pembangunan sebagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan menjadi salah satu beranda terdepan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan Negara Tetangga Malaysia. Wilayah kerja yang luas, jarak tempuh dan kondisi medan yang berat merupakan salah satu kendala apalagi belum adanya jalan poros penghubung pada Ke-4 tempat tersebut.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau berdiri pada tanggal 06 Februari 1984 dengan SK. Menteri Kehakiman No. M.01-PR.07.04 tahun 1984 dan berkantor di Jalan Badang tepatnya di Rumah Dinas Imigrasi yang dibangun tahun 1980, kemudian pada tahun 1985 pindah ke Jl. Sutan Syahrir No. 261, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau hingga sekarang.

Peta Lokasi dan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau



Dalam perjalanannya, pada Februari 2002 Gedung Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau pernah mengalami kebakaran dan memusnahkan seluruh inventaris kantor beserta arsip fasilitatif dan arsip substantif. Akibatnya secara keseluruhan kegiatan operasional menjadi terhambat. Kemudian agar kegiatan pelayanan keimigrasian bisa tetap berjalan maka sejak tanggal 12 Februari 2002 kegiatan operasional kantor dialihkan ke Gedung Karantina hingga awal Februari 2003. Pada bulan Maret 2003 Kantor baru yang dibangun pada lokasi yang sama selesai dibangun dan kegiatan pelayanan keimigrasian pun kembali dialihkan di gedung yang baru dibangun tersebut hingga saat ini.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau menyelenggarakan fungsinya sebagai :

1. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.
2. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian.
3. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.
4. Melaksanakan tugas Fasilitatif bidang Tata Usaha (Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Urusan Umum).

Dalam lingkup strategis penyelenggaraan pelayanan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, yang meliputi :

1. Pelayanan Dokumen Perjalanan, Fasilitas Keimigrasian;
2. Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan Keimigrasian;

3. Persetujuan Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian;
4. Intelijen dan penindakan pelaku pelanggaran keimigrasian;
5. Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
6. Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi tiap bagian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau adalah sebagai berikut :

- 1) **Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan urusan fasilitatif bidang Tata Usaha, yaitu :
 - 1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Menghimpun pendistribusian, pengelolaan arus surat menyurat dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi
 - 3) Mengumpulkan kearsipan surat masuk dan dokumen kantor
 - 4) Menyelenggarakan dan mengatur administrasi pemeliharaan kendaraan dinas
 - 5) Mengompilasikan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, rumah dinas serta pemeliharaan pemakaian telpon, listrik, air dan kebersihan ruangan
 - 6) Memeriksa berkas tagihan pemeliharaan kantor, gedung kantor, rumah dinas dan biaya tanggungan listrik dan telepon
 - 7) Menghimpun usulan pelaksanaan penghapusan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas
 - 8) Menghimpun pembuatan daftar gaji/dan rapel pegawai
 - 9) Menghitung dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas
 - 10) Menghimpun pelaksanaan pengamanan di lingkungan kantor
 - 11) Menganalisa data kepegawaian dan usul-usul formasi pegawai sebagai bahan usul untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Pra jabatan dan ujian dinas tingkat I dan tingkat II
 - 12) Menyusun usulan pemberian penghargaan, tanda penghormatan dan Kartu Pegawai bagi CPNS yang telah diangkat menjadi PNS, permintaan pengujian kesehatan dan penyusunan DUK
 - 13) Membuat pengusulan kenaikan pangkat pengusulan pengangkatan dalam jabatan Struktural, pemindahan pegawai, pemberhentian, dan pension.
- 2) **Seksi Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian:**
 - 1) Membuat rencana kerja tahunan pada Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian
 - 2) Melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan SPRI
 - 3) Melakukan pengecekan kelengkapan berkas Exit Re-Entry Permit dan loket
 - 4) Membubuhkan paraf setelah lengkap berkas permohonan paspor dan berkas exit Re-Entry Permit
 - 5) Melakukan pengawasan terhadap staf, loket, entry data, foto, wawancara, pencetakan paspor, bagian pengambilan paspor dan pengambilan Re-Entry Permit
 - 6) Melakukan Koordinasi dengan staf Lantaskim (briefing).
 - 7) Melakukan koordinasi dengan atasan langsung serta evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kerja pada sub seksi
 - 8) Menandatangani perpanjangan izin tinggal kunjungan pada paspor
 - 9) Memberikan paraf perpanjangan KITAS

- 10) Memberikan paraf pada surat permohonan perpanjangan KITAP
- 11) Memberikan paraf pada surat permohonan konversi ITK ke ITAS
- 12) Memberikan paraf pada surat permohonan ITAS KE ITAP
- 13) Mengusulkan perpanjangan KITAS dan KITAP ke Kantor Wilayah
- 14) Mengusulkan konversi ITK ke ITAS ke Kantor Wilayah
- 15) Menandatangani surat penangguhan perpanjangan ITAS
- 16) Menandatangani surat penangguhan alih status ITK ke ITAS
- 17) Menandatangani surat penangguhan alih status ITAS ke ITAP
- 18) Memberikan paraf pada surat permohonan SKIM
- 19) Menandatangani dan memberikan penilaian terhadap kinerja petugas seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian.

3) Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian :

- 1) Melakukan pemantuan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antara instansi di bidang pengawasan orang asing;
- 2) Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggran keimigrasian.

4) Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian :

- 1) Menyusun rencana program kerja seksi TIKKIM
- 2) Menandatangani buku pengawasan orang asing
- 3) Menandatangani Exit Permit Only
- 4) Menandatangani mutasi alamat
- 5) Menandatangani surat keluar
- 6) Melaksanakan digitalisasi file
- 7) Melaksanakan publikasi dan visualisasi
- 8) Pemutakhiran data
- 9) Membuat laporan bulanan dan statistik kegiatan WNI dan WNA
- 10) Penataan arsip WNI dan WNA.

D. STRUKTUR ORGANISASI DAN PETA JABATAN

Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal. Struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab dan sistem pelaporan terhadap atasan.

Peta Jabatan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau :

JABATAN	NAMA
Kepala Kantor	Alberthus Santani Fenat

Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Candra Wahyu Hidayat
<i>Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian</i>	-
<i>Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian</i>	-
Kasi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	Oddy Permana
<i>Kasubsi Lalu Lintas Keimigrasian</i>	<i>Sukarna Bong Syam</i>
<i>Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian</i>	-
Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Yahya Anshari
<i>Kasubsi Intelijen Keimigrasian</i>	<i>Hendra Saputra</i>
<i>Kasubsi Penindakan Keimigrasian</i>	-
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Iksan Nurhak Korompot
<i>Kaur Kepegawaian</i>	<i>Jovial Repani</i>
<i>Kaur Keuangan</i>	<i>Herkulanus</i>
<i>Kaur Umum</i>	<i>Angga Pratama</i>



Untuk memberikan gambaran secara umum Kondisi Satuan Kerja dan SDM Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Jabatan

Jabatan	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	Jumlah
Jabatan Struktural	1	4	2	2	1	-	-	-	-	10
Jabatan Fungsional	-	1	-	10	6	1	6	-	16	40
Total										50

Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	Jumlah
Laki-laki	1	4	2	8	5	-	5	-	13	38
Perempuan	-	1	-	4	2	1	1	-	3	12
Total										50

Berdasarkan Status Pegawai

Status Pegawai	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	Jumlah
ASN	1	5	2	12	7	1	6	-	15	49
CASN	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Total										50

Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	Jumlah
S-I	1	5	-	4	2	-	-	-	-	12
D-III	-	-	1	4	1	-	-	-	-	6
SMA	-	-	1	4	4	1	6	-	16	32
Total										50

Tenaga Honorer

PPNPN	Jumlah
Security	3
Supir	1
Petugas Kebersihan	2
Total	6

Fasilitas Bangunan dan Kendaraan Dinas

Fasilitas	Jumlah	Status
Bangunan Kantor	1	Baik
Rumah Tahanan	1	Baik
Rumah Dinas	10	8 [Baik], 2 [Rusak Ringan]
Pagar	4	Baik
Tempat Parkir	1	Baik
Mushola + Kantin	1	1 Lokal [2 tingkat][Baik]

Kendaraan Roda 4	7	5 [BMN][Baik], 1 [sewa] [Baik]
Kendaraan Roda 2	16	11 [baik], 2 [rusak ringan], 3 [rusak berat]

E. MAKSUD DAN TUJUAN LKJIP

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategis pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024.

Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024 dan selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2020-2024 yang dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional Presiden terpilih untuk berfokus melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah. Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 merupakan panduan dalam perencanaan mengenai arah kebijakan dan strategis

Direktorat Jenderal Imigrasi dilengkapi usulan kegiatan strategis masing-masing direktorat serta kerangka kelembagan dan pendanaannya. Dengan mengedepankan inovasi dalam pelayanan, penegakan hukum keimigrasian yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia imigrasi yang berintegritas memunculkan optimisme bahwa rencana strategis yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah pusat secara makro.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini adalah untuk melaporkan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau dalam mencapai Target Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan didalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020 - 2024. Adapun tujuannya adalah untuk :

- (1) Penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan,
- (2) Penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang,
- (3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang
- (4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagian sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

F. DASAR HUKUM

1. Surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Nomor F4.IL.01.10-2.1457 tanggal 11 Agustus tahun 1997 perihal Peningkatan Operasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah Kerja Masing- masing Kantor Imigrasi;
2. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Direktur Informasi Keimigrasian Nomor F5-IL.01-2.1794 Tanggal 14 Desember 2000 perihal Pendataan Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-0611.IZ.01.10 tahun 2004 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Kemudahan Khusus Keimigrasian;
6. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/9/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003;
8. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
10. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja.
11. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
12. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
13. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
14. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
18. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 01 / M.PAN / 01 / 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

G. PENGERTIAN LKJIP

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan

para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistem penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, meliputi :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, maksud dan tujuan, dasar hukum, pengertian LKjIP, serta sistematika penulisan dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*).

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yaitu; Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, serta gambaran umum Capaian Kinerja pada periode 2021.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi (Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja Realisasi Anggaran) dan Realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau Tahun Anggaran 2022.

4. BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini menarik kesimpulan dari pembahasan Kesimpulan, Saran dan Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja untuk periode 2023.

5. LAMPIRAN

Kumpulan Lampiran Data Pendukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, meliputi : Perjanjian Kinerja, Dokumentasi Layanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau Tahun Anggaran 2022.

I. PERMASALAHAN UTAMA DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau kami bagi menjadi 2 bagian sebagai berikut :

1. Bidang Fasilitatif/Administrasi

a. Urusan Kepegawaian :

- 1) Jabatan Struktural (Kasubi Teknologi Informasi Keimigrasian, Kasubi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kasubi Izin Tinggal Keimigrasian dan Kasubi Penindakan Keimigrasian sampai saat ini belum terisi;
- 2) Minimnya bentuk Pelatihan/Diklat Kepegawaian terkait penggunaan aplikasi kepegawaian berbasis web.

b. Urusan Keuangan :

- 1) Masih minimnya pengetahuan staf keuangan terkait indikator penilaian SMART dan IKPA;
- 2) Rangkap jabatan KPA sekaligus PPK.

c. Urusan Umum :

- 1) Masih belum adanya tindak-lanjut terkait penyelesaian BMN milik Direktorat Jenderal Imigrasi berupa perangkat komunikasi yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, namun keberadaannya masih di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau;
- 2) Belum ada Pegawai yang memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga untuk mengisi jabatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau harus menggunakan tenaga bersertifikasi PBJ dari luar.
- 3) Perangkat pendukung operasional yang diperuntukkan pada TPI Sungai Kelik telah terdistribusi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, namun Pos Lintas Batas/Tempat Pemeriksaan Imigrasi belum beroperasi.

2. Bidang Substantif/Teknis Operasional

a. Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian

- 1) Belum adanya kendaraan khusus untuk mendukung program layanan keimigrasian Easy Passpor maupun Paspor Simpatik, sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan secara optimal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau;
- 2) Luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau dan beratnya medan yang harus dilewati untuk sampai di perbatasan, sehingga sangat dibutuhkan kendaraan lapangan yang handal (wajib doble gardan).

b. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

- 1) Belum adanya pejabat struktural yang mengisi posisi Kasubsi Penindakan Keimigrasian.

c. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi

- 1) Belum adanya anggaran yang cukup untuk pengadaan perangkat/fasilitas pendukung dalam penyajian data maupun media informasi yang cepat dan akurat pada Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 2) Belum adanya pejabat struktural yang mengisi posisi kasubsi, baik Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian maupun Kasubsi Komunikasi Keimigrasian pada Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 3) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi yang dapat memberikan atau menyajikan data atau informasi terkait keimigrasian secara cepat dan akurat;
- 4) Sudah semakin banyaknya dokumen arsip pada gudang arsip tikkim, namun tidak sepadan dengan ruang arsip yang ada.

Sebagai langkah strategis pemecahan masalah tersebut diatas, maka langkah-langkah strategis yang kami ambil, dijabarkan sebagai berikut :

1. Bidang Fasilitatif/Administrasi

a. Urusan Kepegawaian :

- 1) Jabatan Struktural (Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian, Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian dan Kasubsi Penindakan Keimigrasian sampai saat ini belum terisi, sehingga semua pekerjaan dikerjakan sendiri oleh kepala seksi.

b. Urusan Keuangan :

- 1) Untuk menyaliasi minimnya pengetahuan staf keuangan terkait indikator penilaian SMART dan IKPA, Urusan Keuangan melakukan konsultasi secara mandiri terkait pengelolaan, baik internal kementerian maupun external kementerian;
- 2) Sementara belum ada pegawai yang memiliki kualifikasi sebagai PPK, maka PPK dirangkap oleh KPA.

c. Urusan Umum :

- 1) Terkait adanya beberapa perangkat milik Direktorat Jenderal Imigrasi yang masih berada pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau namun dalam pencatatan BMN tidak masuk dalam daftar BMN Kanim Sanggau, telah kami sampaikan baik melalui surat maupun konsultasi langsung ke Direktorat Jenderal Imigrasi, namun hingga kini belum ada tindak-lanjut atas permasalahan tersebut diatas;
- 2) Mengingat tidak adanya pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau yang memiliki sertifikasi barang dan jasa, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau terpaksa harus menggunakan Pejabat Pengadaan dari luar. Diharapkan kedepan akan ada kegiatan Diklat terkait Pengadaan Barang dan Jasa;
- 3) Terkait dengan telah tersedianya perangkat pendukung operasional yang diperuntukkan pada TPI Sungai Kelik, namun Pos Lintas Batas/Tempat Pemeriksaan Imigrasi belum beroperasi, maka langkah selanjutnya menunggu arahan dari atas.

2. Bidang Substantif/Teknis Operasional

a. Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian

- 1) Untuk mengoptimalkan program layanan keimigrasian Easy Passpor dan Paspor Simpatik, kami berharap adanya dukungan perangkat dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud diatas. Saat ini kegiatan dimaksud tetap berjalan namun dengan fasilitas seadanya;
- 2) Untuk bisa melewati medan menuju perbatasan yang berat, petugas yang melaksanakan operasi di wilayah perbatasan sangat terbantu dengan adanya unit kendaraan sewa yang ada, sehingga diharapkan unit kendaraan sewa tetap difasilitasi pada tahun-tahun mendatang. Selain itu pula, kegiatan Easy Paspor terbantu dengan adanya unit mobil sewa ini.

b. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

- 1) Belum adanya pejabat struktural yang mengisi posisi Kasubsi Penindakan Keimigrasian disiasati dengan dirangkap oleh Kepala Seksi.

c. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi

- 1) Belum adanya anggaran yang cukup untuk pengadaan perangkat/fasilitas pendukung dalam penyajian data yang cepat dan akurat pada Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Seksi Tikkim Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau memanfaatkan fasilitas seadanya.
- 2) Belum adanya Pejabat Struktural yang mengisi posisi Kasubsi Teknologi Informasi dan Kasubsi Informasi Keimigrasian, sehingga semua kegiatan terpaksa dilaksanakan secara rangkap oleh kepala seksi maupun anggotanya;
- 3) Untuk mengatasi permasalahan dokumen arsip yang sudah semakin menumpuk dan sulit mendapat tempat penyimpanan yang ada, Seksi Tikkim bersama bagian Urusan Umum dan Rumah Tangga telah melakukan konsultasi untuk melakukan penghapusan arsip ke bagian tata kearsipan Kanwil Kumham Kalbar.

J. PERJANJIAN KINERJA 2022

Untuk memberikan gambaran secara umum atas rencana anggaran dan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau pada Tahun Anggaran 2022, berikut kami sajikan Target Kegiatan dan Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	9871 Orang	583.412.000
		Jumlah Layanan Penerbitan Izin Tinggal	140 Orang	91.098.000
		Jumlah Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	24 Operasi	351.240.000
		Jumlah Operasi Mandiri di Wilayah	6 Operasi	163.968.000
		Jumlah Operasi Gabungan di Wilayah	2 Operasi	64.532.000
		Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1 Operasi	63.020.000
		Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian	2 Orang	170.460.000
		Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	600 Orang	520.504.000
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Orang Asing	4 Laporan	186.458.000
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan	73.318.000
		Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	125.267.000
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	475.567.000
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	3.610.018.000
		Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Layanan	590.021.000
		Jumlah Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	164.358.000

		Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	69.576.000
		Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	43.709.000
		Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	1 Layanan	61.200.000

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1630 tahun 2020) serta telah ditetapkannya Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tanggal 28 Desember 2020, berikut disampaikan beberapa hal untuk menjadi pedoman penyusunan Renstra pada Unit Pelaksana Teknis Imigrasi Tahun 2020-2024 :

Prioritas tugas dan fungsi Imigrasi untuk periode tahun 2020-2024 telah disesuaikan dari Pelayanan dan Penegakan Hukum menjadi Pengamanan dan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. Fungsi pengamanan dimaksudkan untuk menguatkan peran imigrasi dalam mendukung stabilitas, politik, hukum, pertahanan dan keamanan selaras dengan Prioritas Nasional ke-7 (Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik). Sedangkan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diprioritaskan untuk mempermudah perizinan keimigrasian dalam rangka mendukung upaya peningkatan nilai tambah wisata, perbaikan iklim usaha dan investasi serta pengembangan kawasan strategis. Sehingga secara makro dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional (produktif, mandiri, dan berdaya saing);

1. Bahwa terdapat 3 (tiga) Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan pendekatan pengembangan prosperity, security dan environment: Pertama, Penguatan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan yang memandang bahwa perbatasan adalah pintu gerbang aktivitas perekonomian dan perdagangan antar negara; Kedua, Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian dengan cara memberikan kemudahan dan fasilitas keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat terutama pada pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) di wilayah perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Internasional; Ketiga, Dukungan Manajemen dengan melakukan optimalisasi dalam upaya mendukung pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui delapan area perubahan Reformasi Birokrasi;

2. Strategi yang akan diterapkan dan selaras dengan Arah Kebijakan Ditjenim adalah:

a. *Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan:*

- 1) Mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah TIMPORA, membangun dashboard berbasis IT, penguatan sarana prasarana, harmonisasi kebijakan, serta penguatan pemeriksaan dan pengawasan;
- 2) Penguatan dan perluasan Border Control Management;
- 3) Penguatan proses pengumpulan serta pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian;

- 4) Peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

b. *Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat:*

- 1) Penyederhanaan birokrasi;
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- 3) Pengembangan Inovasi pelayanan keimigrasian berbasis Teknologi Informasi;
- 4) Perluasan jangkauan pelayanan keimigrasian;
- 5) Peningkatan PNBK keimigrasian

c. *Dukungan Manajemen*

Penerapan tata kelola pemerintah yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas SDM; pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel serta pemenuhan sarana dan prasarana.

3. Arah Kebijakan, Strategi dan Kegiatan Strategis dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 tersebut merupakan turunan dari Renstra Kementerian Hukum dan HAM, serta untuk menjadi pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dalam penyusunan rencana strategis pada wilayah kerja masing-masing.

1) **VISI, MISI, MOTO, JANJI LAYANAN DAN TATA NILAI**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau yang mengacu pada Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI, yaitu :

"Masyarakat Memperoleh **Kepastian Hukum**"

Sedangkan **Misi** adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau mengacu pada Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI, Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu "**Melindungi Hak Asasi Manusia**"

Motto memiliki arti kalimat, Frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan. Adapun Motto Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau adalah "**Melayani Dengan Tulus**"

Janji Layanan, merupakan sikap dan tindakan yang harus direalisasikan dalam wujud nyata dalam memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan misi organisasi, yaitu :

1. Kepastian persyaratan
2. Kepastian Biaya
3. Kepastian waktu penyelesaian

Adapun Tata Nilai **Kementerian** Hukum dan Hak Asasi manusia yang menjadi landasan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. **Profesional**, aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. **Akuntabel**, setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. **Sinergi**, komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
4. **Transparan**, kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2) TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan Sasaran **Strategis** Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau adalah "*Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian*". **Sasaran Strategis** yang hendak dicapai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keimigrasian;
- 3) Menyelenggarakan Layanan Sarana dan Prasarana Internal;
- 4) Menyelenggarakan Layanan Manajemen Satker;
- 5) Menyelenggarakan Layanan Perkantoran.

B. PERJANJIAN KINERJA 2022

1. PROGRAM DAN ANGGARAN

Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas, ditetapkan Sasaran Program Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan, dan Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah Sebanyak 5 (lima) Kegiatan yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait dimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dimaksud. Untuk mendukung tercapainya sasaran sebagaimana tersebut diatas.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau mengalokasikan anggaran pada Tahun 2022 untuk masing-masing program. Adapun realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut yang merupakan angka final setelah

mengalami revisi anggaran :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	564,444,599	580,876,081	99.57
		Jumlah Layanan Penerbitan Izin Tinggal	91,098,000	87,040,867	95.55
		Jumlah Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	351,240,000	350,668,476	99.84
		Jumlah Operasi Mandiri di Wilayah	163,968,000	162,834,368	99.31
		Jumlah Operasi Gabungan di Wilayah	64,532,000	50,507,881	78.27
		Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	63,020,000	0	0
		Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian	170,460,000	129,300,076	75.85
		Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	520,504,000	498,280,995	95.73
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Orang Asing	186,458,000	183,437,633	98.38
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Jumlah Layanan BMN	73,318,000	73,296,145	99.97
		Jumlah Layanan Umum	125,267,000	119,882,202	95.70
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	475,567,000	472,563,135	99.37
		Jumlah Layanan Perkantoran	3,610,018,000	3,555,840,692	98.50
		Jumlah Layanan Sarana Internal	590,021,000	569,377,502	96.50
		Jumlah Layanan Manajemen SDM	164,358,000	161,154,477	98.05
		Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	69,576,000	69,271,211	99.56
		Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	43,709,000	43,359,481	99.20
		Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	61,200,000	61,149,000	99.92

Implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 untuk Tahun 2022 mencakup pelaksanaan 2 program. Untuk melaksanakan program tersebut telah disediakan anggaran Pagu DIPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. **7.148.455.000,-** yang kemudian mengalami revisi anggaran pada akhir tahun 2022 sebagai dampak adanya penambahan sejumlah pegawai yang mempengaruhi berubahnya pagu anggaran pada Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan menjadi Rp **7.407.726.000,-**.

Dari anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-013.06.2.409145/2022 dan sepanjang Tahun Anggaran 2022 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau telah melakukan revisi DIPA kewenangan DJA sebanyak 1 kali, PA 1 kali, DJPB 1 kali dan Administrasi 4 kali.

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses indentifikasi, pengembangan seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah

1. Spesifik dan jelas;
2. Dapat diukur secara obyektif;
3. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan
4. Tidak bias.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	9871 Orang	10,830 Orang	109,71
		Jumlah Layanan Penerbitan Izin Tinggal	140 Orang	153 Orang	109,28
		Jumlah Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	24 Operasi	43 Operasi	179,16
		Jumlah Operasi Mandiri di Wilayah	6 Operasi	22 Operasi	366,66
		Jumlah Operasi Gabungan di Wilayah	2 Operasi	2 Operasi	100,00
		Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1 Operasi	0 Operasi	0,00
		Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian	2 Orang	2 Orang	100,00
		Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	600 Orang	600 Orang	100,00
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Orang Asing	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		Jumlah Layanan Manajemen SDM	39 Layanan	50 Layanan	128,20
		Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	1 Layanan	1 Layanan	100,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi strategis organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau merupakan Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum Dan HAM RI Propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum Dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.

LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada periode/tahun tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA 2022

Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses Sistematis dan Berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan kinerja kegiatan, dimana tingkat pencapaian diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *input*, *output* dan *outcome*.

1. **Input** : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM dan sebagainya.
2. **Output** : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

3. **Outcome** : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek Langsung).

Pengukuran Capaian Kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan program dan kebijakan. Capaian kinerja Tahun 2022 merupakan Realisasi dari Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcome*.

Realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

1) Realisasi Anggaran menurut Jenis Belanja :

No.	Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	2,439,543,000	2,394,562,668	98.16
2.	Belanja Barang	4,378,162,000	4,196,704,426	95.86
3.	Belanja Modal	590,021,000	569,377,502	96.50
Total		7,407,726,000	7,160,644,596	96.66

2) Realisasi Kegiatan menurut Program :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	9871 Orang	10,830 Orang	109,71
		Jumlah Layanan Penerbitan Izin Tinggal	140 Orang	153 Orang	109,28
		Jumlah Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	24 Operasi	43 Operasi	179,16
		Jumlah Operasi Mandiri di Wilayah	6 Operasi	22 Operasi	366,66
		Jumlah Operasi Gabungan di Wilayah	2 Operasi	2 Operasi	100,00
		Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1 Operasi	0 Operasi	0,00
		Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian	2 Orang	2 Orang	100,00
		Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	600 Orang	600 Orang	100,00
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Orang Asing	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		Jumlah Layanan Manajemen SDM	39 Orang	50 Orang	128,20
		Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal yang terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100,00

Jumlah anggaran kegiatan Tahun 2022 yang bersumber dari RM (*Rupiah Murni*) dan PNBP (*Penerimaan*

Negara Bukan Pajak) sebesar **Rp 7,407,726,000,-**. Jumlah **realisasi** anggaran kegiatan per 31 Desember 2022 adalah Rp **7,160,644,596**. Dengan demikian maka total persentase penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **96.66 %**. Dari angka capaian diatas, capaian realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau menunjukkan angka yang sudah ideal.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada table diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2022, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Pencapaian sasaran peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian tahun 2022 sebagai berikut :

1.1 Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI dan Layanan Penerbitan Izin Tinggal

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	564,444,599	580,876,081	99.57
		Jumlah Layanan Penerbitan Izin Tinggal	91,098,000	87,040,867	95.55

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Penerbitan Paspor yang dikeluarkan	9871 Orang	10,830 Orang	109,71
		Jumlah Izin Tinggal yang dikeluarkan	140 Orang	153 Orang	109,28

“Angka penurunan kasus aktif COVID-19 secara konsisten sejak akhir Februari 2022 lalu memberikan optimisme pada upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Tingginya antusiasme masyarakat mengajukan permohonan paspor terlihat dari tingginya penerbitan paspor yang melampaui target yang ditetapkan. Berikut tabel dan grafik penerbitan paspor maupun penerbitan Izin Tinggal sepanjang tahun 2022 :

BULAN	PASPOR	IZIN TINGGAL	TOTAL
JANUARI	68	8	76
FEBRUARI	179	6	185
MARET	397	12	409
APRIL	516	22	538
MEI	764	13	777
JUNI	1.407	4	1.411
JULI	1.465	15	1.480
AGUSTUS	1.023	15	1.038
SEPTEMBER	1.245	27	1.272
OKTOBER	834	16	850
NOVEMBER	1.282	8	1.290
DESEMBER	1.650	7	1.657
TOTAL	10.830	153	10.983

Dari tabel diatas terlihat bahwa sepanjang tahun 2022 antusiasme permohonan paspor terbilang tinggi. Penerbitan paspor pada tahun anggaran 2022 melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 9.871 paspor, namun paspor yang diterbitkan sebesar **10.830** paspor.

Easy Paspor merupakan salah satu produk layanan unggulan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Wilayah kerja yang luas, yang mencakup 4 kabupaten (Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi) menjadi pertimbangan utama untuk menghadirkan layanan paspor mobile, sehingga kehadiran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Sepanjang tahun 2022, telah dilaksanakan Easy Paspor di **18** tempat dengan **689** permohonan paspor baru dan **733** permohonan penggantian, sehingga total menjadi **1.422** permohonan (13% dari total penerbitan paspor).

Dari tingginya angka penerbitan dokumen keimigrasian, baik paspor maupun dokumen keimigrasian lainnya, Kanim Kelas II TPI Sanggau berhasil membukukan pendapatan negara (PNBP) sebesar Rp **4.609.000.000,-** melampaui target sebesar Rp **1.805.250.000,-**. Berikut tabel target dan realisasi PNBP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau :

NO	KODE SATKER	AKUN	TARGET PNBP	TOTAL REALISASI
1	409145	425211	1.555.000.000	4.308.000.000
2	409145	425213	250.250.000	301.250.000
TOTAL			1.805.250.000	4.609.250.000



NO	JENIS PERMOHONAN	PERMOHONAN										JUMLAH	
		DISETUJUI		DITOLAK									
				WAWANCARA		ADJ KANIM		ADJ PUSAT		SISTEM			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Baru	2.103	2.123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.226
2	Penggantian Habis Berlaku	3.115	3.348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.463

3	Penggantian Halaman Penuh	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	22
4	Penggantian Hilang	53	43	-	-	-	-	-	-	-	-	96
5	Penggantian Rusak	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	JUMLAH	5.294	5.536	-	-	-	-	-	-	-	-	10.830

NO	JENIS DOKIM	TOTAL
1	PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA	5
2	KARTU FASILITAS KEIMIGRASIAN	3
3	PERPANJANGAN IZIN KUNJUNGAN	25
4	PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN	15
5	PENERBITAN IZIN TINGGAL TERBATAS BARU 1 TAHUN	21
6	PENERBITAN IZIN TINGGAL TERBATAS BARU 2 TAHUN	1
7	PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS 1 TAHUN	48
8	PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS MAKSIMAL 6 BULAN	7
9	ALIH STATUS IZIN KUNJUNGAN MENJADI ITAS 1 TAHUN	24
10	ALIH STATUS ITAS MENJADI ITAP	4
	TOTAL	153



1.2 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian, Operasi Mandiri, Operasi Gabungan dan Penyidikan Tindakan Pidana Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	351,240,000	350,668,476	99.84
		Jumlah Operasi Mandiri di Wilayah	163,968,000	162,834,368	99.31
		Jumlah Operasi Gabungan di Wilayah	64,532,000	50,507,881	78.27
		Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	63,020,000	0	0

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Penyelidikan Intelijen keimigrasian di Wilayah	24 Operasi	43 Operasi	179,16
		Jumlah Operasi Mandiri di Wilayah	6 Operasi	22 Operasi	366,66
		Jumlah Operasi Gabungan di Wilayah	2 Operasi	2 Operasi	100,00
		Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1 Operasi	0 Operasi	0,00

Sepanjang tahun 2022, Seksi Inteldakim melaksanakan 43 operasi Intelijen, 22 operasi mandiri, 2 operasi gabungan dan nihil Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. Tingginya realisasi kegiatan pada operasi Penyidikan Intelijen Keimigrasian dan Operasi Mandiri dikarenakan adanya pemecahan operasi menjadi tim-tim kecil, sehingga bisa mengcover area yang luas dalam waktu bersamaan.

Untuk operasi gabungan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Sedangkan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian nihil, dikarenakan tidak ditemukannya pelanggaran keimigrasian sepanjang tahun 2022.

Adapun bentuk kegiatan Intelijen dan operasi mandiri lainnya dikemas dalam bentuk koordinasi, konsultasi, baik internal Kemenkumham maupun pihak-pihak eksternal terkait lainnya

1.3 Tindakan Administratif Keimigrasian dan Pemeriksaan Keimigrasian di TPI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian	170,460,000	129,300,076	75.85
		Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	520,504,000	498,280,995	95.73

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian	2 Orang	2 Orang	100,00
		Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	600 Orang	600 Orang	100,00

Sebagai suatu bentuk pengawasan dan pengendalian masyarakat dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam rangka Penegakan Hukum Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau telah melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap 2 warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

Kegiatan Pemeriksaan Keimigrasian di TPI belum berjalan secara optimal, hal tersebut dikarenakan belum dibukanya Pos Lintas Batas Negara antara Indonesia dengan Malaysia. PLBN Sungai Kelik, dalam hal lokasi titik nol belum ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Hal ini yang menjadi penyebab belum dilaksanakannya pembangunan PLBN Sungai Kelik hingga saat ini.

Namun demikian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau semaksimal mungkin untuk tetap hadir secara rutin di wilayah perbatasan guna menegakkan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan Menjaga keutuhan wilayah teritorial NKRI sesuai amanat konstitusi.

1.4 Pengawasan Orang Asing

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Kegiatan Pengawasan Orang Asing	186,458,000	183,437,633	98.38

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah yang terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00

Adapun bentuk Pengawasan Orang Asing yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau adalah dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing di seluruh kabupaten yang masuk dalam Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

Tim Pengawasan Orang Asing (Tim-PORA) adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing. Pembentukan Tim-PORA dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Sepanjang tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau menggelar rapat Tim-PORA di 4 kabupaten dengan melibatkan Forkopimda setempat. Adapun Tim-PORA yang dibentuk bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing dengan melakukan pengumpulan, pertukaran, analisa, evaluasi data dan informasi keberadaan Orang Asing, penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing, hingga melaksanakan Operasi Gabungan yang bersifat khusus maupun insidental. Berikut tabel pelaksanaan Tim-PORA di 4 Kabupaten :

NO.	RAPAT TIM PORA	JUMLAH PESERTA	TANGGAL
1.	KABUPATEN SANGGAU	30 Orang	25 Mei 2022
2	KABUPATEN MELAWI	30 Orang	28 September 2022
3	KABUPATEN SINTANG	30 Orang	26 Oktober 2022
4	KABUPATEN SANGGAU	30 Orang	10 Nopember 2022

Untuk mengetahui aktivitas warga negara asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau Tahun 2022, berikut kami sajikan rekap dalam tabel berdasarkan Laporan Detil Register Izin Tinggal WNA pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau :

NO.	REGISTER	JUMLAH
1.	PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA	5
2	KARTU FASILITAS KEIMIGRASIAN	3
3	PERPANJANGAN IZIN KUNJUNGAN	25
4	PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN	15
5	PENERBITAN IZIN TINGGAL TERBATAS BARU 1 TAHUN	21
6	PENERBITAN IZIN TINGGAL TERBATAS BARU 2 TAHUN	1
7	PEPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS 1 TAHUN	48
8	PEPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS MAKS. 6 BULAN	2
9	ALIH STATUS IZIN KUNJUNGAN MENJADI ITAS 1 TAHUN	27
10	ALIH STATUS IZIN KUNJUNGAN MENJADI ITAS MAKS. 6 BULAN	3
11	ALIH STATUS ITAS MENJADI ITAP	4

12	PENGEMBALIAN DOKIM (EPO)	23
13	REP/MREP TIDAK KEMBALI	10
14	PERUBAHAN NAMA/ PASPOR	14
15	PERUBAHAN STATUS SIPIL	1
16	PERUBAHAN ALAMAT TINGGAL ANTAR KANIM	3
17	MREP 1 TAHUN	1
18	MREP 2 TAHUN	2
TOTAL		209

Berikut Daftar WNA untuk wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi Tahun 2022 :

NO.	REGISTER	JUMLAH
1.	KABUPATEN SANGGAU	39
2	KABUPATEN SEKADAU	24
3	KABUPATEN SINTANG	40
4	KABUPATEN MELAWI	19
TOTAL		122

2. Sasaran Peningkatan Kualitas Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi

2.1 Layanan BMN, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi serta Layanan Perkantoran

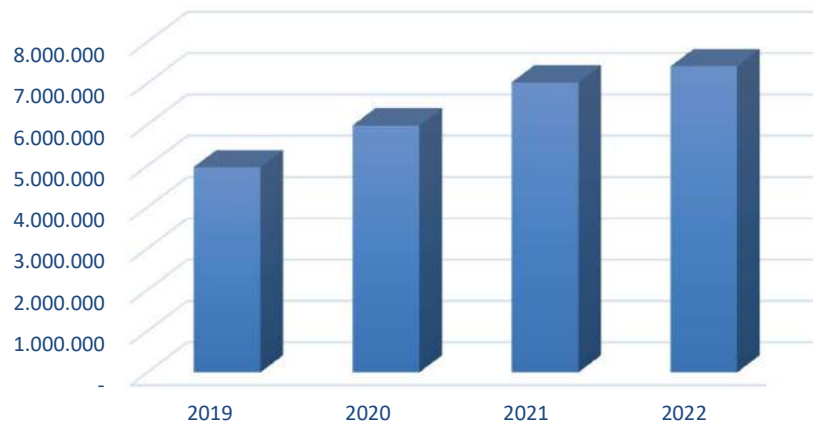
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Jumlah Layanan BMN	73,318,000	73,296,145	99.97
		Jumlah Layanan Umum	125,267,000	119,882,202	95.70
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	475,567,000	472,563,135	99.37
		Jumlah Layanan Perkantoran	3,610,018,000	3,555,840,692	98.50

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Jumlah Layanan BMN terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100.00
		Jumlah Layanan Umum terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100.00
		Jumlah Layanan Data dan Informasi terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100.00
		Jumlah Layanan Perkantoran terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100.00

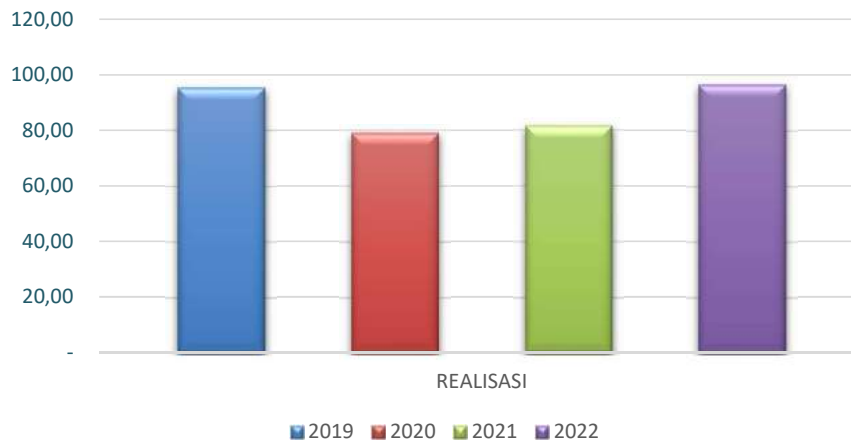
Secara umum Layanan BMN, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi serta Layanan Perkantoran berjalan baik dan lancar. Serapan anggaran memenuhi target. Adapun bentuk kegiatan Layanan Perkantoran terdiri atas Layanan Gaji dan Tunjangan serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Pada tahun anggaran 2022 terjadi perubahan anggaran dari Rp 7,148,455,000,- menjadi Rp 7,407,726,000,- sebagai akibat adanya penambahan sejumlah pegawai.

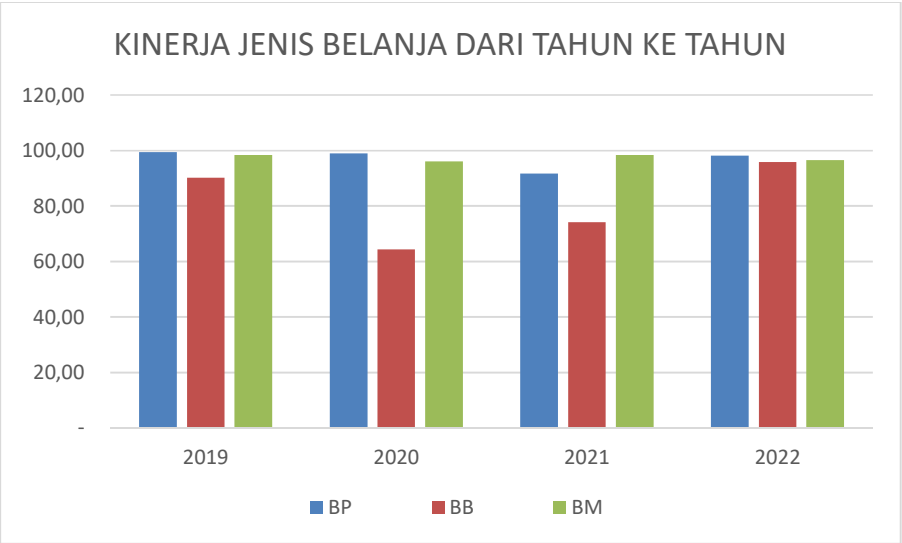
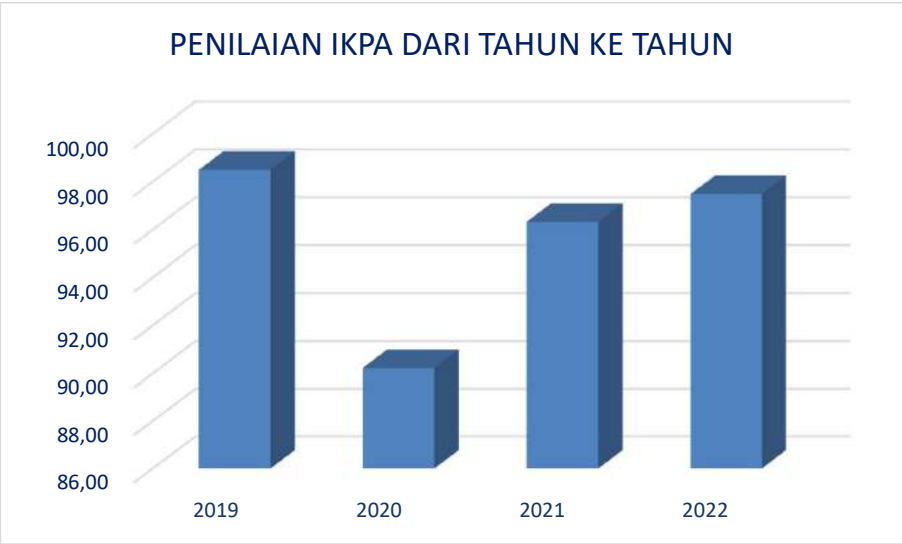
Berikut grafik yang menggambarkan alokasi anggaran dan kinerja anggaran dari tahun ke tahun pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau :

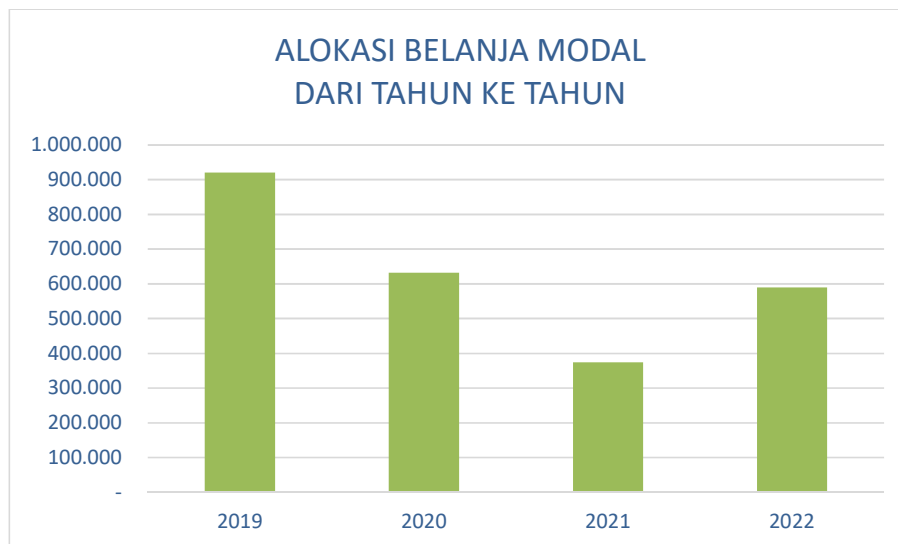
ALOKASI PAGU DARI TAHUN KE TAHUN



REALISASI ANGGARAN DARI TAHUN KE TAHUN







2.2 Layanan Sarana Internal

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Jumlah Layanan Sarana Internal	590,021,000	569,377,502	96.50

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Jumlah Layanan Sarana Internal yang terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100.00

Kegiatan Layanan Sarana Internal dapat terlaksana 100% dan berjalan dengan baik. Walaupun pelaksanaannya sempat mengalami pergeseran beberapa kali yang disebabkan adanya kebijakan penggunaan produk dalam negeri (TKDN) yang juga memberikan dampak pada adanya perubahan harga menjadi lebih tinggi,

hal ini dapat disiasati dengan melakukan revisi pergeseran anggaran antar KRO, sehingga kegiatan dapat terlaksana.

Tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau melakukan revisi anggaran atas pertimbangan tidak optimalnya serapan anggaran pada salah satu kegiatan. Salah satu kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran hasil revisi tersebut adalah Kegiatan Layanan Sarana Internal. Adapun yang menjadi acuan dalam melaksanakan revisi kewenangan DJA ini adalah RKBMN 2022 yang telah disahkan oleh Kepala Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berikut tabel realisasi Layanan Sarana Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, baik sebelum revisi maupun sesudah revisi anggaran :

NO	NAMA BARANG	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	PENAMBAHAN
1	Kursi Besi/Metal	12	22	12
2	Meja Kerja Kayu	12	12	-
3	LCD Projector/Infocus	1	1	-
4	PC Unit	4	6	2
5	Laptop	4	5	1
6	Pengadaan Sepeda Motor	2	2	-
7	Transportable Generating Set	1	1	-
8	TV	0	1	1
9	Camera	0	1	1
10	Mesin Potong Rumput	0	1	1
		36	52	18

2.3 Layanan Manajemen SDM

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal	164,358,000	161,154,477	98.05

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal yang terlaksana	39 Orang	50 Orang	100.00

Tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau mendapatkan tambahan pegawai sebanyak 11 pegawai (Jabatan Fungsional Umum) yang merupakan perpindahan antar satker. Dengan penambahan ini, diharapkan kekurangan JFU pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau dapat teratasi. Dengan demikian hingga 31 Desember 2022 total pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau sebanyak 50 pegawai. Dengan perubahan ini, maka postur anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, khususnya pada Belanja Pegawai ikut mengalami penambahan anggaran sebanyak **Rp 259.271.000,-** yang telah diselesaikan di

Desember 2022 melalui revisi PA.

Adapun bentuk kegiatan Manajemen SDM Internal yang terlaksana adalah Pembinaan Mental Pegawai, baik Jasmani (senam pagi dan kerja bhakti di lingkungan kantor) maupun Mental Rohani (ceramah keagamaan). Selain itu telah dilaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai, baik pemeriksaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 maupun kesehatan pegawai secara umum. Disamping itu dilaksanakan pula koordinasi maupun konsultasi, baik internal maupun eksternal Kemenkumham terkait Tugas dan Fungsi Kepegawaian.

2.4 Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Manajemen Keuangan dan Layanan Reformasi Kinerja

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	69,576,000	69,271,211	99.56
		Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	43,709,000	43,359,481	99.20
		Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	61,200,000	61,149,000	99.92

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		Jumlah Layanan Manajemen Keuangan terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		Jumlah Layanan Reformasi Kinerja terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100,00

Pada Kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau mengikuti Penyusunan Anggaran, mulai dari Penyusunan Angkabut, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi. Selain itu dilaksanakan kegiatan konsultasi, baik ke KPPN, DJPB, Kanwil Kumham Kalbar maupun di Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi. Begitu pula dalam pelaksanaan Layanan Manajemen Keuangan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan konsultasi terkait penataan manajemen keuangan, baik ke Kanwil Kumham Kalbar maupun Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh KPPN Sanggau.

Untuk Kegiatan Layanan Reformasi Kinerja, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau menjadi salah satu satuan kerja yang diusulkan untuk mengikuti seleksi menjadi Satker berpredikat WBK. Rangkaian kegiatan itu sendiri dikemas dalam bentuk kegiatan pemaparan secara langsung di depan Tim Penilai Internal yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Selain itu dilaksanakan pula kegiatan Studi Tiru di Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum program kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 dapat terlaksana dengan baik. Serapan Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau sudah baik karena sudah bisa melampaui **95.00%**, yaitu **96.66%**. Dari total pagu anggaran **Rp. 7,407,726,000,-** yang terealisasi adalah sebesar **Rp. 7,160,644,596,-**. Nilai SMART final yang diraih pada tahun 2022 adalah 87,47% dengan rincian Penyerapan 96,66 %, Konsistensi 98,45 %, CRO 100 %, Efisiensi 3,33 % dan Nilai Efisiensi 58,32 %. Dari Uraian tersebut sudah menunjukkan angka yang positif.

Indikator Kinerja yang terbagi menjadi 18 Kegiatan dengan masing-masing target dapat terlaksana dengan baik. Bahkan beberapa kegiatan bisa melampaui target yang ditetapkan.

B. SARAN

Kegiatan yang berkaitan dengan fasilitatif, baik urusan keuangan, urusan kepegawaian dan urusan umum dan rumah tangga berjalan baik, begitu pula kegiatan yang berkaitan dengan Substantif. Namun demikian beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian untuk tahun mendatang antara lain :

1. Besarnya dorongan terhadap reformasi birokrasi dalam pemerintahan, dan besarnya tuntutan terhadap layanan publik yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif, sehingga dibutuhkan suatu perubahan yang besar pula. Pemenuhan sarpras yang baik dan nyaman merupakan suatu hal yang wajib dilakukan. Atas dasar hal tersebut diatas, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau berharap adanya dukungan berupa alokasi anggaran untuk memenuhi sarpras yang baik sehingga layanan prima dapat dirasakan oleh masyarakat dan predikat WBK/WBBM niscaya akan berhasil;
2. Melakukan penataan administrasi kegiatan pada masing-masing seksi maupun urusan, sehingga pada saat dibutuhkan akan mudah untuk didapat dan disajikan (bahan laporan) serta berperan aktif dalam menggali kebutuhan pada masing-masing bagian, sehingga apa yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Melakukan monitoring atas realisasi rencana penarikan dana dan rencana kegiatan dan memastikan rencana yang dibuat benar-benar dapat dilaksanakan sesuai rencana, sehingga diperoleh hasil penilaian IKPA dan SMART yang baik;
4. Melakukan Penataan BMN dengan baik, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan, baik pada saat perencanaan kebutuhan dan penganggaran (RKBMN); pengadaan; penggunaan; pemanfaatan;

pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;

5. Luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau yang membawahi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi serta medan untuk menuju perbatasan yang berat, maka perlu kiranya untuk tetap diberikan fasilitas kendaraan operasional perbatasan, sehingga kegiatan operasional perbatasan dapat dilaksanakan secara optimal;
6. Tingginya animo masyarakat terhadap Layanan Paspor Mobile berupa Easy Paspor, sehingga perlu mendapat dukungan sarpras yang memadai, sehingga kehadiran Layanan Keimigrasian di daerah benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.







KANTOR IMIGRASI SANGGAU



KANTOR IMIGRASI SANGGAU BERIKAN LAYANAN **EAZY** PASSPORT DI KANTOR SATPOL PP SINTANG



Kamis, 31 Maret 2022

[KANTOR IMIGRASI SANGGAU](#)
[KANTOR IMIGRASI SANGGAU](#)
[IMIGRASISANGGAU](#)
[IMIGRASI_SANGGAU](#)
 0857-8731-0838



KANTOR IMIGRASI SANGGAU



Layanan Eazy Passport Kantor Imigrasi Sanggau goes to Kecamatan Sintang




Kamis, 10 Februari 2022

[KANTOR IMIGRASI SANGGAU](#)
[KANTOR IMIGRASI SANGGAU](#)
[IMIGRASISANGGAU](#)
[IMIGRASI_SANGGAU](#)
 0857-8731-0838



KANTOR
IMIGRASI
SANGGAU



PENGAWALAN PEMINDAHAN 1 (SATU) ORANG ASING WARGA NEGARA YAMAN KE RUDENIM PONTIANAK



Pemindahan bertujuan agar dilakukan pendetensian terhadap ybs
WN Yaman inisial AA di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak

Jumat, 29 Juli 2022



Imigrasi_sanggau



ImigrasiSanggau



kanimsanggau.kemenkumham.go.id



0857-8731-0838



KANTOR
IMIGRASI
SANGGAU



KERJA BAKTI DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI SANGGAU



Jumat, 25 Maret 2022



KANTOR IMIGRASI SANGGAU



KANTOR IMIGRASI SANGGAU



IMIGRASI SANGGAU



IMIGRASI_SANGGAU



0857-8731-0838



 **KANTOR IMIGRASI SANGGAU** 

**INSPEKTUR WILAYAH I KEMENKUMHAM RI
KUNJUNGI KANTOR IMIGRASI SANGGAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI
SANGGAU**



**Kunjungan dilakukan dalam rangka evaluasi lapangan
Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM**

 Selasa, 07 Juni 2022

 [imigrasi_sanggau](#)  [imigrasiSanggau](#)  [kantorimigrasi.kemendikhum.go.id](#)  0857-8731-0838

 **KANTOR IMIGRASI SANGGAU** 

**LAYANAN HAM KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI SANGGAU**




BerAKHLAK **REFORMASI HUKUM** **PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA**

 [@kantorimigrasi_sanggau](#)  [Kantor Imigrasi sanggau](#)  [@imigrasi_sanggau](#)

**SELASA
17 MEI 2022**



KANTOR
IMIGRASI
SANGGAU



KANTOR IMIGRASI SANGGAU IKUTI KEGIATAN DISEMINASI PELAKSANAAN PERMENKUMHAM NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM (P2HAM)



Dalam kegiatan ini, dilaksanakan pula Penganjuran
dan Pengukuhan Pelayanan Publik Berbasis
Hak Asasi Manusia (P2HAM)

Rabu, 22 Juni 2022

Hotel Mercure Pontianak



Imigrasi_sanggau



ImigrasiSanggau



kanimsanggau.kemerkumham.go.id



0857-8731-0838



KANTOR
IMIGRASI
SANGGAU



SENAM PAGI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU

Jumat, 18 Maret 2022

Aula Kantor Imigrasi Sanggau



KANTOR IMIGRASI SANGGAU



KANTOR IMIGRASI SANGGAU



IMIGRASI SANGGAU



IMIGRASI_SANGGAU



0857-8731-0838



KANTOR
IMIGRASI
SANGGAU



OPERASI GABUNGAN TIM PORA IMIGRASI - SATGAS PAMTAS YONIF 144 JY - KADES SEI KELIK



Kamis, 03 Maret 2022 Sei Kelik, Kec. Ketungau Hulu, Kab. Sintang

KANTOR IMIGRASI SANGGAU KANTOR IMIGRASI SANGGAU IMIGRASISANGGAU IMIGRASI_SANGGAU 0857-6731-0838



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau
Melakukan Pendeportasian
Kewarganegaraan Malaysia
di PLBN Entikong



@kanim_sanggau Kantor Imigrasi sanggau @imigrasi_sanggau

Selasa
14 Juni 2022



PENGAWASAN LAPANGAN PENGECEKAN ORANG ASING



BerAKHLAK

**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

**Jumat
3 Juni 2022**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alberthus Santani Fenat
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Pamuji Raharja.
Jabatan : Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sanggau, 28 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Imigrasi
Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pamuji Raharja
NIP. 19670122 199103 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Sanggau

Alberthus Santani Fenat
NIP. 19720218 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU
DENGAN KEPALA DIVISI IMIGRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.471.072.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.471.072.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.677.383.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 4.677.383.000,-


Sanggau, 28 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Imigrasi
Kantor Wilayah Kalimantan Barat



Pamuji Raharja
NIP. 19670122 199103 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Sanggau



Alberthus Santani Fenat
NIP. 19720218 199203 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Alberthus Santani Fenat
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sanggau, 28 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Sanggau


Alberthus Santani Fenat
NIP. 19720218 199203 1 002



PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	013-409145	KANTOR IMIGRASI KELAS II SANGGAU	167	PAGU	1,940,937,000	2,106,543,000	919,742,000	0	0	0	0	0	0	4,967,222,000
				REALISASI	1,930,743,241	1,901,004,760	905,521,800							4,737,269,801
				PERSENTASE	(99.47%)	(90.24%)	(98.45%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(95.37%)
				SISA	10,193,759	205,538,240	14,220,200	0	0	0	0	0	0	229,952,199
TOTAL				PAGU	1,940,937,000	2,106,543,000	919,742,000	0	0	0	0	0	0	4,967,222,000
				REALISASI	1,930,743,241	1,901,004,760	905,521,800							
				PERSENTASE	(99.47%)	(90.24%)	(98.45%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(95.37%)
				SISA	10,193,759	205,538,240	14,220,200	0	0	0	0	0	0	229,952,199



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Pengelolaan UP	Data Kontrak	Kesalahan SPM	Retur SP2D	Hal III DIPA	Revisi DIPA	Penyelesaian Tagihan	Rekon LPJ	Renkas	Realisasi	Pagu Minus	Dispensasi SPM	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
1	167	409145	KANTOR IMIGRASI KELAS II SANGGAU	Nilai Bobot (%)	95.00	100.00	90.00	100.00	93.45	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	93.57	95%	98.50
				Nilai Akhir	9.50	15.00	5.40	6.00	4.67	5.00	15.00	5.00	0.00	20.00	4.00	4.00			

Disclaimer:

Per 17 Juli 2018, Satker BLU dikeluarkan dari Perhitungan IKPA

Sehubungan dengan transisi aplikasi LPJ bendahara tahun 2018, indikator LPJ tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai akhir IKPA tahun 2018



PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	013-409145	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU	167	PAGU	1,948,889,000	3,397,386,000	632,195,000	0	0	0	0	0	0	5,978,470,000
				REALISASI	1,929,179,113	2,189,540,989	607,449,149	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,726,169,251
				PERSENTASE	(98.99%)	(64.45%)	(96.09%)						(79.05%)	
				SISA	19,709,887	1,207,845,011	24,745,851	0	0	0	0	0	0	1,252,300,749
TOTAL				PAGU	1,948,889,000	3,397,386,000	632,195,000	0	0	0	0	0	0	5,978,470,000
				REALISASI	1,929,179,113	2,189,540,989	607,449,149	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)
				PERSENTASE	(98.99%)	(64.45%)	(96.09%)						(79.05%)	
				SISA	19,709,887	1,207,845,011	24,745,851	0	0	0	0	0	0	1,252,300,749



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)				
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM				Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA
1	167	409145	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU	Nilai	100.00	60.47	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	89.85	100.00	100.00	99.27	0.00	85.00	85.71	95%	90.23					
				Bobot	5	5	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5								
				Nilai Akhir	5.00	3.02	5.00	15.00	8.00	5.00	0.00	13.48	12.00	10.00	4.96	0.00	4.25								
				Nilai Aspek	86.82			75.00				97.28				85.00									

Disclaimer:

1) Modul Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran menampilkan data transaksi untuk periode Januari s.d. Desember 2020 sesuai parameter periode yang dipilih. Nilai indikator pada modul ini ditampilkan untuk kepentingan pemeliharaan data dan manajerial, serta tidak menjadi basis penilaian IKPA OMSPAN oleh BUN..

2) Untuk mengakses nilai IKPA yang menjadi basis penilaian kembali IKPA dalam [S-614/PB/2020](#) tanggal 17 Juli 2020 tentang Penilaian IKPA K/L Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN, silahkan akses modul Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Reaktivasi)..



PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	013-409145	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU	167	PAGU	2,392,338,000	4,252,112,000	374,900,000	0	0	0	0	0	0	7,019,350,000
				REALISASI	2,194,342,009	3,156,074,964	369,225,000							5,719,641,973
				PERSENTASE	(91.72%)	(74.22%)	(98.49%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(81.48%)
				SISA	197,995,991	1,096,037,036	5,675,000	0	0	0	0	0	0	1,299,708,027
TOTAL				PAGU	2,392,338,000	4,252,112,000	374,900,000	0	0	0	0	0	0	7,019,350,000
				REALISASI	2,194,342,009	3,156,074,964	369,225,000							
				PERSENTASE	(91.72%)	(74.22%)	(98.49%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(81.48%)
				SISA	197,995,991	1,096,037,036	5,675,000	0	0	0	0	0	0	1,299,708,027



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)				
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM				Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA
1	167	409145	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU	Nilai	100.00	60.17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.02	100.00	100.00	100.00	0.00	85.00	91.51	95%	96.33					
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5								
				Nilai Akhir	5.00	3.01	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	14.25	10.00	17.00	5.00	0.00	4.25								
				Nilai Aspek	86.72			100.00				98.76				85.00									

Disclaimer:

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output



PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total	
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	013-409145	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU	167	PAGU	2,439,543,000	4,378,162,000	590,021,000	0	0	0	0	0	0	7,407,726,000	
				REALISASI	2,394,562,668	4,196,704,426	569,377,502							7,160,644,596	
				PERSENTASE	(98.16%)	(95.86%)	(96.50%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(96.66%)	
				SISA	44,980,332	181,457,574	20,643,498	0	0	0	0	0	247,081,404		
TOTAL				PAGU	2,439,543,000	4,378,162,000	590,021,000	0	0	0	0	0	0	7,407,726,000	
				REALISASI	2,394,562,668	4,196,704,426	569,377,502								7,160,644,596
				PERSENTASE	(98.16%)	(95.86%)	(96.50%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(96.66%)	
				SISA	44,980,332	181,457,574	20,643,498	0	0	0	0	0	247,081,404		



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

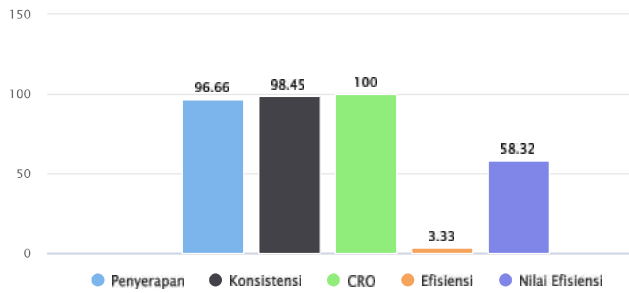
Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	167	013	409145	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU	Nilai	100.00	75.47	99.69	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.49	100%	97.49
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.55	19.94	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	87.74		99.94					100.00			

Disclaimer:Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Nilai SMART 87.47

Baik

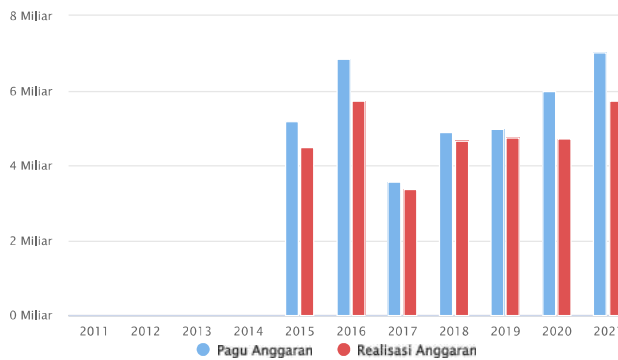


Nilai IKPA

● Prosentase Pencapaian Kinerja

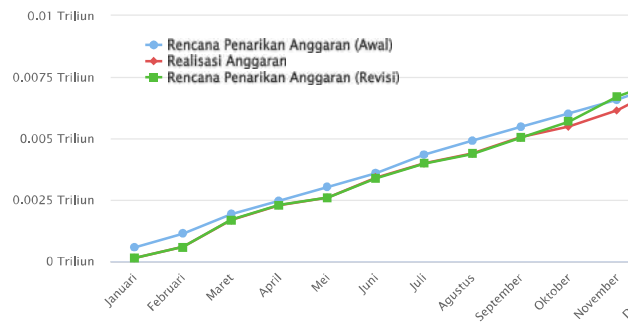
Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2022



Penyerapan Anggaran

Tahun Anggaran: 2022



Persentase Volume RO



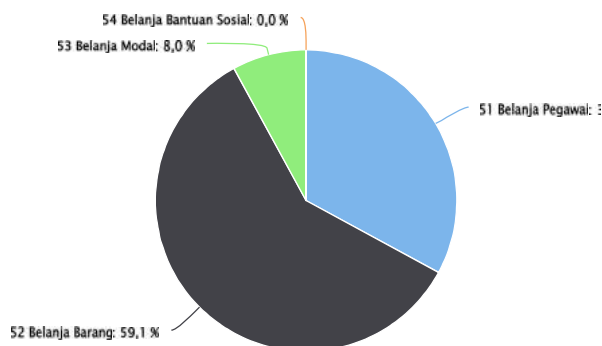
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	2.439.543.000	2.394.562.668	98.16 %
52 Belanja Barang	4.378.162.000	4.196.704.426	95.86 %
53 Belanja Modal	590.021.000	569.377.502	96.50 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

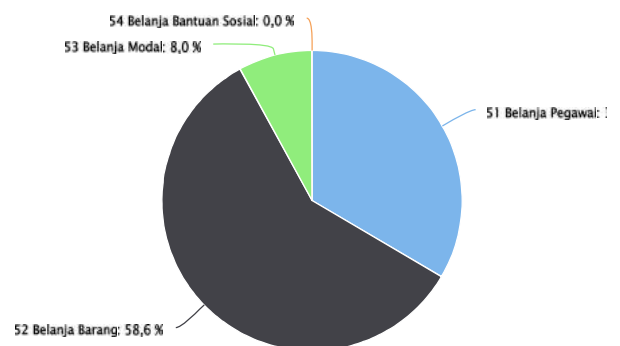
Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



**LAPORAN PROYEKSI DAN REALISASI PNBP
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU**

NO.	SATUAN KERJA	AKUN PNBP	TARGET PNBP	REALISASI SD BULAN LALU	DESEMBER			TOTAL REALISASI	SISA TARGET PNBP
					PROYEKSI	REALISASI	DEVIASI (%)		
1	409145	425211	1.555.000.000	3.655.250.000	129.583.000	652.750.000	404%	4.308.000.000	- 2.753.000.000
2	409145	425213	250.250.000	286.750.000	20.854.000	14.500.000	-30%	301.250.000	- 51.000.000
3	409145	425214	57.500.000	91.700.000	4.791.000	16.500.000	244%	108.200.000	- 50.700.000
TOTAL			1.862.750.000	4.033.700.000	155.228.000	683.750.000	340,48%	4.717.450.000	- 2.854.700.000

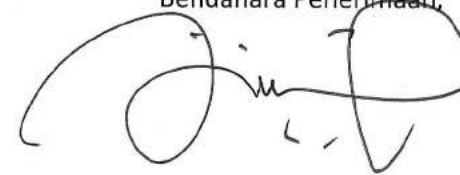
Kepala Urusan Keuangan,



Herkulanus
NIP 197901092010121001

Sanggau, 02 Januari 2023

Bendahara Penerimaan,



Alexander Indra
NIP 198404042006041001

Mengetahui:

Kepala Kuasa Pengguna Anggaran,



Alberthus Santani Fenat
NIP 197202181992031002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU**



**LAPORAN
RAPAT TIM PENGAWASAN ORANG ASING
(TIM PORA)
KABUPATEN SANGGAU
25 MEI 2022**

**SANGGAU
2022**

DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU**



**LAPORAN
RAPAT TIM PENGAWASAN ORANG ASING
(TIM PORA)
KABUPATEN MELAWI
28 SEPTEMBER 2022**

**SANGGAU
2022**

DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU**



**LAPORAN
RAPAT TIM PENGAWASAN ORANG ASING
(TIM PORA)
KABUPATEN SINTANG
26 OKTOBER 2022**

**SANGGAU
2022**

DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU**



**LAPORAN
RAPAT TIM PENGAWASAN ORANG ASING
(TIM PORA)
KABUPATEN SEKADAU
10 NOVEMBER 2022**

**SANGGAU
2022**

DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN

